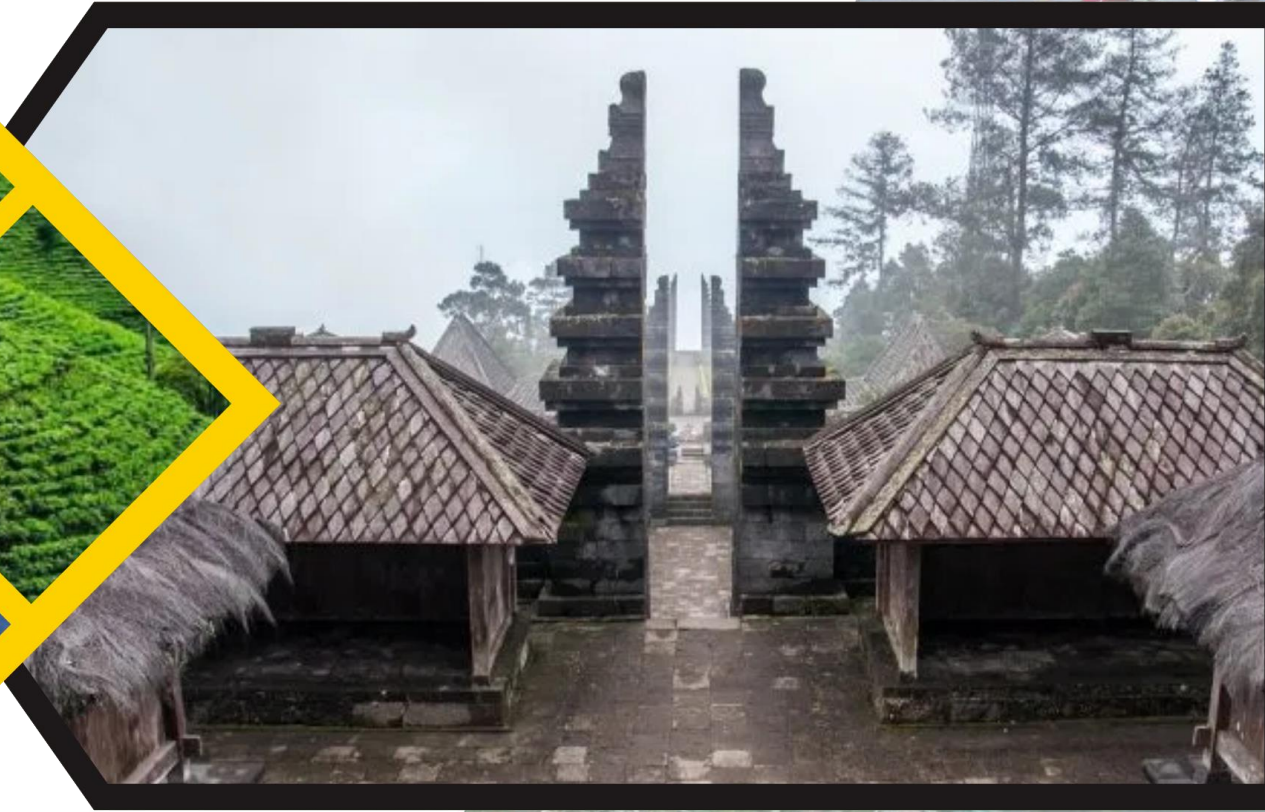




**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

TAHUN 2022



LKjIP

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022 dapat disusun dengan lancar. LKjIP Baperlitbang merupakan laporan pencapaian indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2022.

BAPERLITBANG sebagai Koordinator penyusunan rencana pembangunan daerah, membutuhkan dukungan dan peran serta semua pihak, terutama Perangkat Daerah, agar dapat mewujudkan rencana pembangunan yang berkualitas, realistis konsisten dan sinkron dengan pusat dan provinsi.

BAPERLITBANG sudah melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya selama 1 tahun ini, sesuai dengan rencana dan anggaran. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan adalah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis organisasi Baperlitbang. Hasil pelaksanaan diukur dengan indikator-indikator tertentu yang kemudian dilakukan penilaian untuk mengetahui kinerja organisasi.

Kami mengucapkan semua pihak yang telah mendukung dan kerjsama selama 1 tahun ini sehingga Baperlitbang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik

Karanganyar, 11 Januari 2023

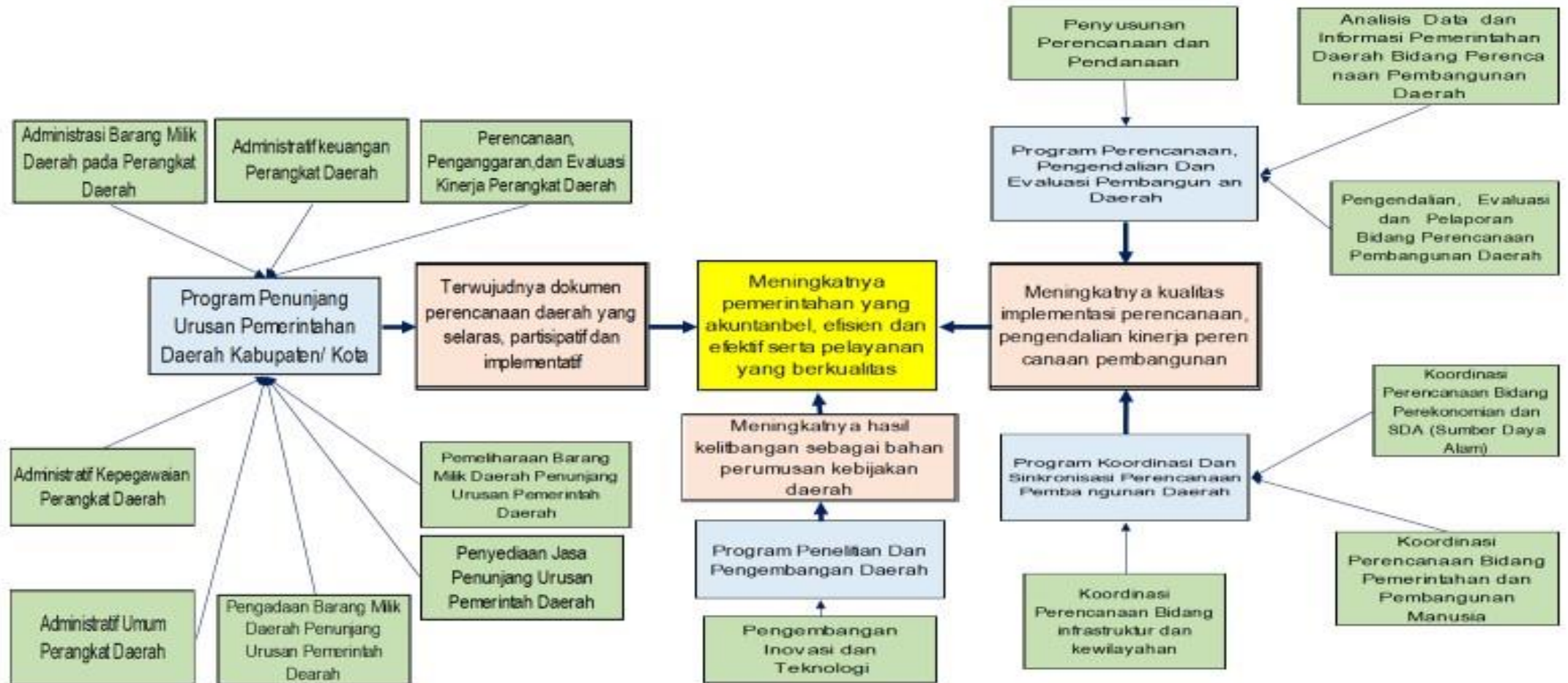
**KEPALA
BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

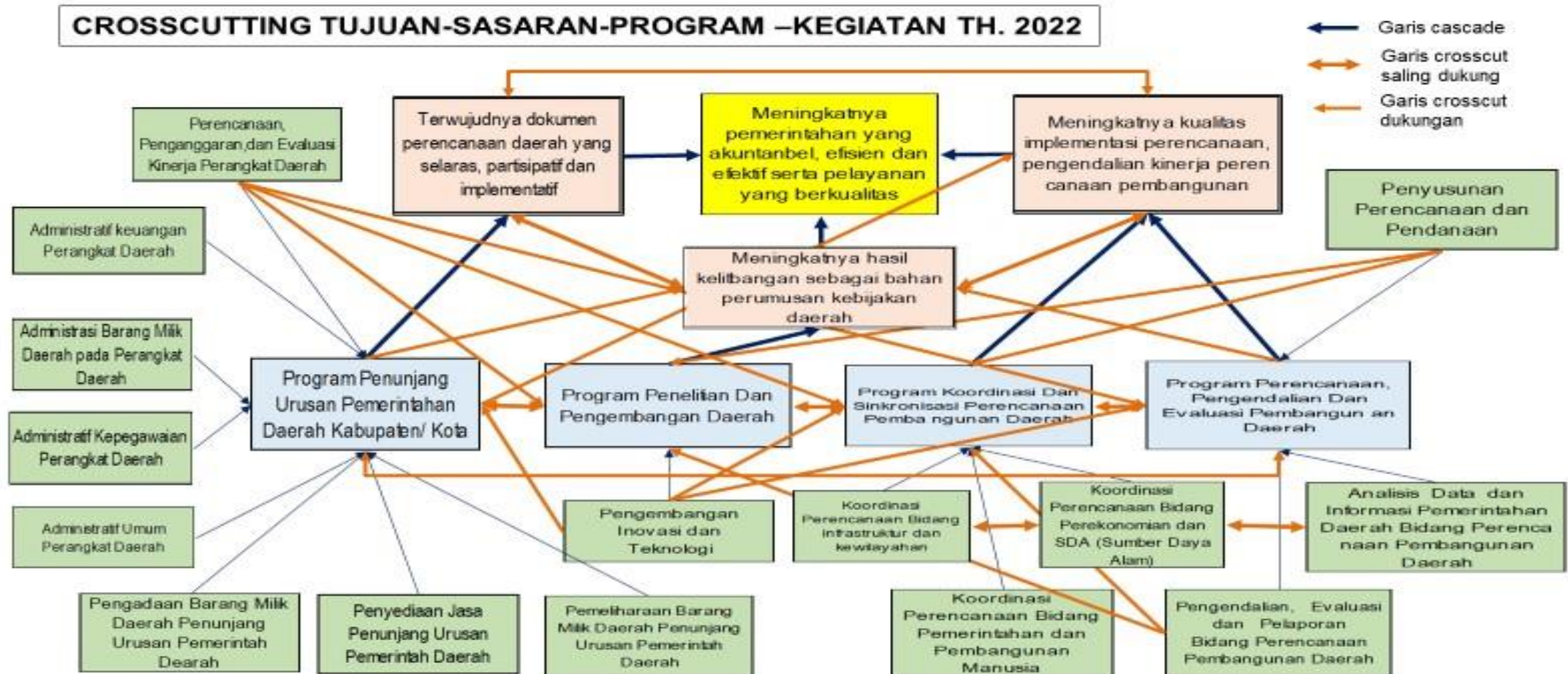
DWI CAHYONO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730614 199303 1 002

DAFTAR ISI

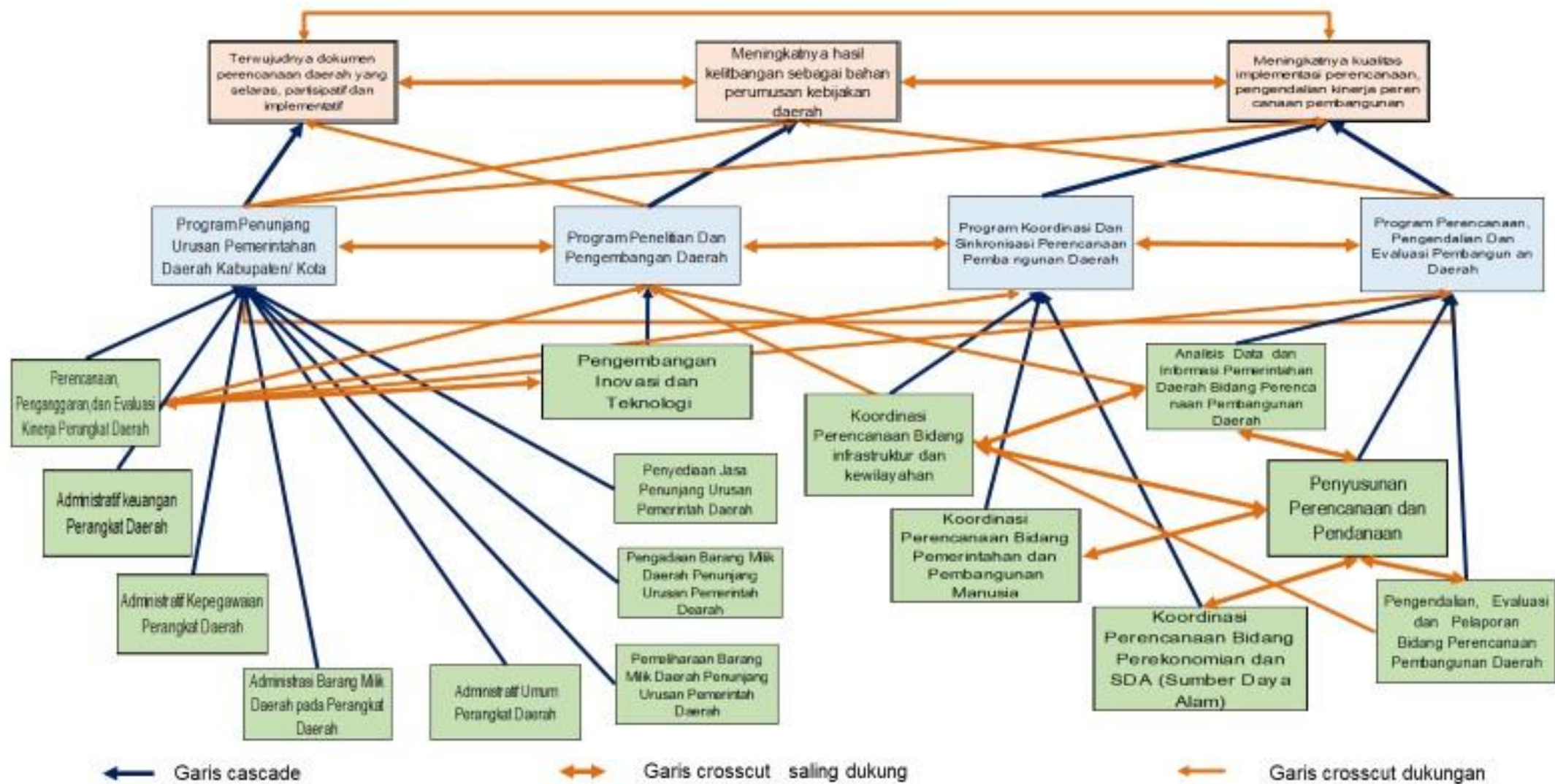
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. LATAR BELAKANG	I-1
B. GAMBARAN UMUM.....	I-2
C. DASAR HUKUM	I-6
D. MAKSUD DAN TUJUAN	I-8
E. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI	I-8
F. SISTEMATIKA PENULISAN	I-9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
A. RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA	II-1
B. PERENCANAAN KINERJA	II-4
C. PERJANJIAN KINERJA	II-7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	III-1
B. REALISASI ANGGARAN	III-7
BAB IV PENUTUP	IV-1
A. KESIMPULAN	IV-1
B. SARAN	IV-1
LAMPIRAN :	
1. Cascading Kinerja	
2. Crosscutting Kinerja	

CASCADING TUJUAN-SASARAN-PROGRAM –KEGIATAN TH. 2022

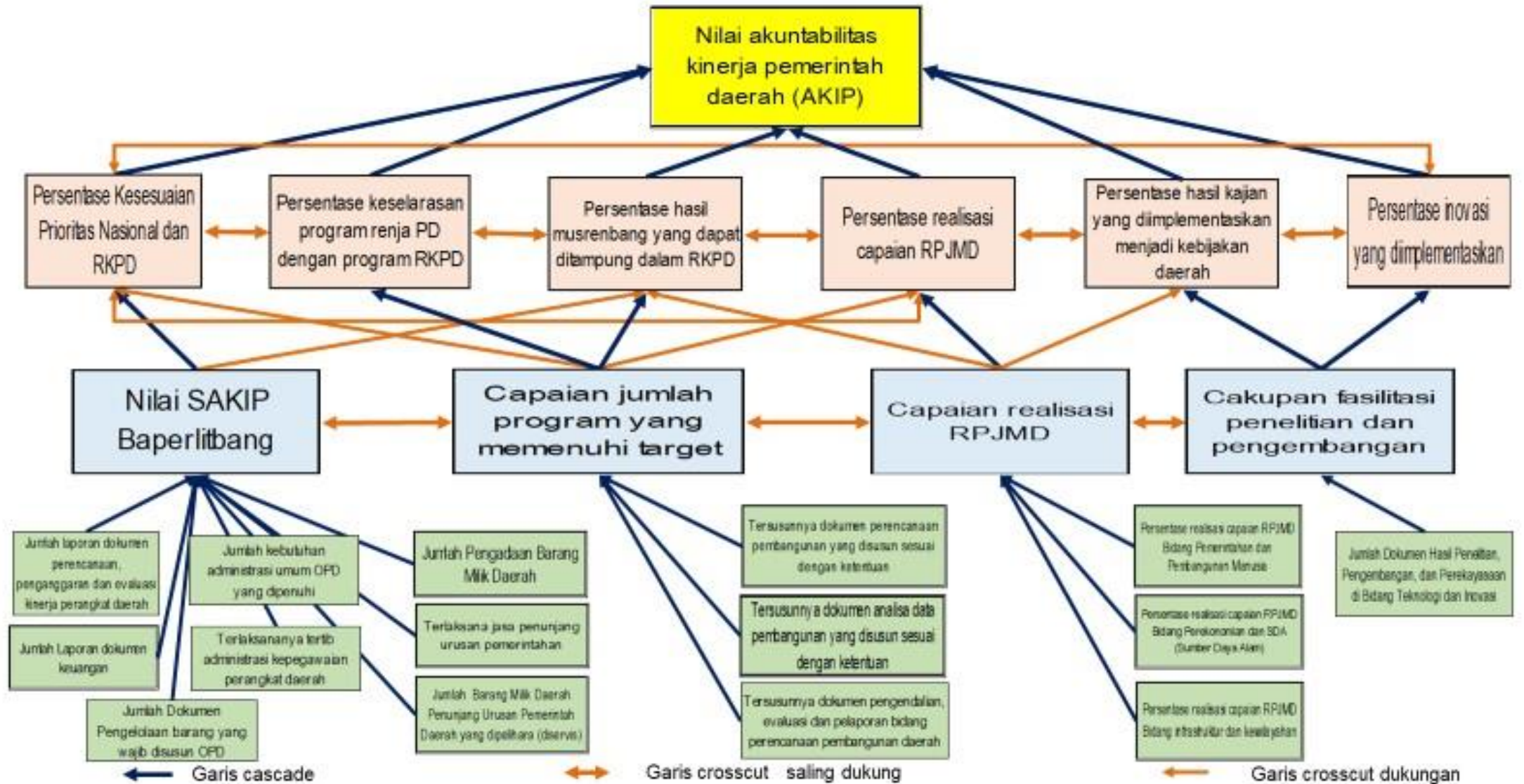




CROSSCUTTING SASARAN-PROGRAM - KEGIATAN TH. 2022



CROSSCUTTING TUJUAN-SASARAN-PROGRAM-KEGIATAN TH. 2022 BERDASARKAN INDIKATOR



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar ASN PNS per Desember 2022	I-5
Tabel 1.2	Daftar ASN Non PNS per Desember 2022	I-5
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPERLITBANG Tahun 2022	II-2
Tabel 2.2	Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2022.....	II-3
Tabel 2.3	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2022.....	II-5
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Pegawai Baperlitbang Tahun 2022	II-7
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022	III-1
Tabel 3.2	Kinerja Program Tahun 2022	III-2
Tabel 3.3	Skala Nilai Peringkat Kinerja	III-2
Tabel 3.4	Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022 dan 2021	III-3
Tabel 3.5	Perbandingan Kinerja Program Tahun 2022 dan 2021	III-3
Tabel 3.6	Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Realisasi Tahun 2022 dan Target 2023	III-4
Tabel 3.7	Perbandingan Kinerja Program Realisasi Tahun 2022 dan Target 2023	III-4
Tabel 3.8	Rincian Capaian Kinerja. Penyerapan dan Efisiensi Anggaran	III-6
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran dan Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	III-7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Baperlitbang	I-4
------------	--	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Selama lima tahun 2018-2023 Kabupaten Karanganyar telah menetapkan visi ” **Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar**” dengan 6 tujuan strategis daerah salah satunya adalah ***Terwujudnya, tata kelola pemerintahan yang baik*** dengan salah satu sasaran daerah adalah **Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas.**

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki 3 (tiga) landasan utama yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan, dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang konsisten, sinkron dengan pusat dan provinsi, realistis dan dapat dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat atau mengatasi permasalahan / isu strategis daerah. Perencanaan dan penganggaran menjadi fungsi yang sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG) Kabupaten Karanganyar melaksanakan 2 (dua) urusan penunjang yaitu urusan Perencanaan. dan urusan Penelitian dan Pengembangan. BAPERLITBANG merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang merupakan kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAPERLITBANG Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BAPERLITBANG menentukan tujuan strategis Perangkat Daerah adalah Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas, dengan 3 sasaran strategis OPD yaitu 1) Terwujudnya dokumen perencanaan daerah yang selaras, partisipatif dan implementatif; 2) Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian kinerja perencanaan pembangunan, 3) Meningkatnya hasil kelitbang sebagai bahan perumusan kebijakan daerah.

Di era Reformasi Birokrasi peran dan kinerja suatu Perangkat Daerah sangat diperlukan, karena jalannya Pemerintahan akan baik jika setiap OPD dapat saling sinergis dan kolaboratif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Setelah melaksanakan kegiatan maka sebagai Perangkat Daerah setiap tahun wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Gambaran Umum

Berikut ini adalah gambaran umum Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar

B.1. Tugas dan Fungsi

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang merupakan kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis pada bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan pada bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Baperlitbang
6. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

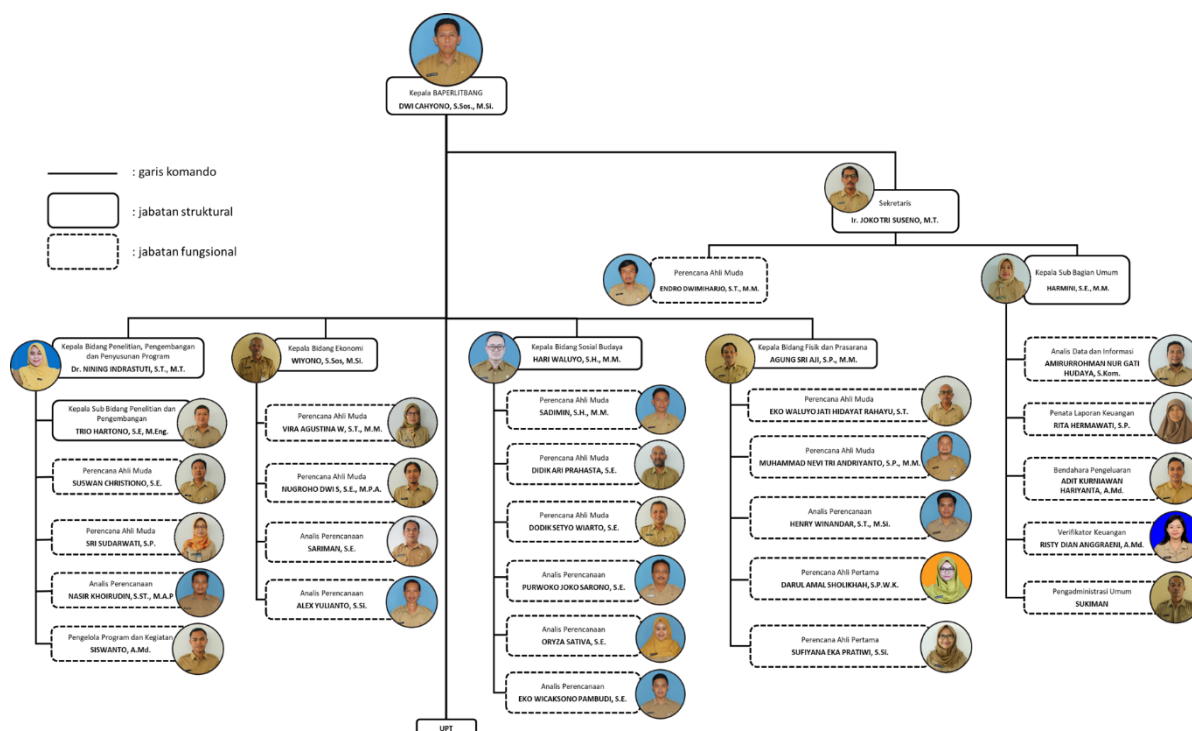
B.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan.

Susunan Pejabat struktural Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Umum
 - b. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Bidang Perencanaan OPD)
3. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Bidang Prasarana Wilayah)
 - b. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Bidang Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam)
4. Kepala Bidang Sosial dan Budaya membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Jabatan Fungsional Perencana Muda (Subkoordinator Bidang Pemerintahan dan Kependudukan)
 - b. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial)
 - c. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga)
5. Kepala Bidang Ekonomi membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Bidang Pengembangan Dunia Usaha)

- b. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Bidang Kedaulatan Pangan dan Energi)
- 6. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Program membawahkan :
 - a. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional :
 - Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan)
 - Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda (Subkoordinator Bidang Penyusunan Program)



Gambar 1.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAPERLITBANG

B.3. Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Baperlitbang di Tahun 2022 dilaksanakan oleh Pegawai yang terdiri dari PNS dan Non PNS, Jumlah Pegawai sebanyak 46 orang terdiri dari 32 PNS dan 14 orang Non PNS sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Daftar ASN PNS per Desember 2022

NO	NAMA	NIP	STATUS	PANGKAT/ GOLONGAN
1.	DWI CAHYONO, S.Sos., M.Si.	19730614 199303 1 002	PNS	Pembina Tingkat I (IV/b)
2.	JOKO TRI SUSENO, S.T., M.T.	19671121 199803 1 010	PNS	Pembina (IV/a)
3.	WIYONO, S.Sos., M.Si.	19670503 198903 1 010	PNS	Pembina (IV/a)
4.	AGUNG SRI AJI, S.P., M.M.	19731231 199903 1 022	PNS	Pembina (IV/a)
5.	Dr. NINING INDRIASTUTI, S.T., M.T.	19761026 200604 2 022	PNS	Pembina (IV/a)
6.	HARI WALUYO,S.H., M.M.	19701009 199803 1 007	PNS	Pembina (IV/a)
7.	HARMINI, S.E., M.M.	19650720 198603 2 011	PNS	Pembina (IV/a)
8.	EKO WALUYO JATI HIDAYAT RAHAYU, S.T.	19700923 199803 1 007	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
9.	ENDRO DWIMIHARJO, S.T., M.M.	19781106 200501 1 005	PNS	Pembina (IV/a)
10.	MUHAMMAD NEVI TRI ANDRIYANTO, SP. MM.	19800413 200501 1 007	PNS	Pembina (IV/a)
11.	SRI SUDARWATI, S.P.	19820602 200604 2 016	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
12.	TRIO HARTONO, S.E., M.Eng.	19781030 200902 1 001	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
13.	SUSWAN CHRISTIONO, S.E.	19840923 200902 1 005	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
14.	VIRA AGUSTINA WULANDARI, S.T., M.M.	19710830 200501 2 006	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
15.	NUGROHO DWI SAPUTRO, S.E., M.P.A.	19840920 200902 1 004	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
16.	SADIMIN, S.H., M.M.	19660910 199203 1 009	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
17.	DODIK SETYO WIARTO, S.E.	19760202 200902 1 003	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
18.	DIDIK ARI PRAHASTA, S.E.	19810904 201001 1 012	PNS	Penata (III/c)
19.	RITA HERMAWATI, S.P.	19710416 199603 2 002	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
20.	SARIMAN, S.E.	19721204 200701 1 023	PNS	Penata Muda Tingkat I (III/b)
21.	AMIRURROHMAN NUR GATI HUDAYA, S.Kom.	19850607 201903 1 007	PNS	Penata Muda (III/a)
22.	SUKIMAN	19790423 200801 1 016	PNS	Juru tingkat I (I/d)
23.	HENRI WINANDAR , S.T.,M.Si	19860525 200902 1 001	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
24.	SUFIYANA EKA PRATIWI, S.Si.	19941215 201903 2 022	PNS	Penata Muda (III/a)
25.	DARUL AMAL SHOLIHAN, S.P.W.K.	19960624 201903 2 012	PNS	Penata Muda (III/a)
26.	NASIR KHOIRUDIN, S.S.T., M.A.P.	19870618 200912 1 005	PNS	Penata Tingkat I (III/d)
27.	ADIT KURNIAWAN HARIYANTA., A.Md.	19841120 201001 1 018	PNS	Penata Muda (III/a)
28.	SISWANTO, A.Md.	19880528 201212 1 001	PNS	Pengatur Tingkat I (II/d)
29.	ALEX YULIANTO, S.Si.	19770706 201001 1 012	PNS	Penata (III/c)
30.	PURWOKO JOKO SARONO, S.E.	19700830 200801 1 003	PNS	Pengatur (II/c)
31.	ORYZA SATIVA, S.E.	19920212 202012 2 007	PNS	Penata Muda (III/a)
32.	EKO WICAKSONO SETYO PAMBUDI., S.E.	19951110 202012 1 006	PNS	Penata Muda (III/a)
33.	RISTY DIAN ANGGRAENI, A.Md.	19941004 202203 2 015	CPNS	Penata Muda (III/a)

Sumber : BAPERLITBANG Tahun 2022, diolah

Tabel 1.2.
Daftar ASN Non PNS per Desember 2022

NO	NAMA	NID NON PNS	NOMOR SK (KONTRAK)
1.	ABDUL QODIR NUGROHO	NONASN.19810801.0404	050/05 Tahun 2021
2.	ANDRI FUKUH PRASETYO	NONASN.19961105.0425	800/241.3/XII/2020
3.	HAFIDZ WILIKA AMAL, S.E.	NONASN.19921205.0361	050/03 Tahun 2021
4.	HETTY WIJAYANTIE, S.E.	NONASN.19830806.0373	800/148.3/XII/2020
5.	INNA SUCI RACHMAWATI, S.T.	NONASN.19840623.0925	050/01 Tahun 2021
6.	LISYANI NAVARI SUSANA, S.T.	NONASN.19890623.0417	050/04 Tahun 2021
7.	RATNA SIH INDRIANI, A.MD	NONASN.19891123.0350	050/08 Tahun 2021
8.	SRI SULARMI, S.P	NONASN.19870919.0400	050/02 Tahun 2021

NO	NAMA	NID NON PNS	NOMOR SK (KONTRAK)
9.	SUKARNO	NONASN.19790217.1024	050/06 Tahun 2021
10.	SUSANTO PRANOTO	NONASN.19680726.1034	050/07 Tahun 2021
11.	TRI JADI PAMUNGKAS, S.T.	NONASN.19920901.0420	800/306.3/XII/2020
12.	WAGIMAN	NONASN.19820929.0409	050/09 Tahun 2021
13.	MUHAMMAD AFIF MAULANA, S.PD.	NONASN.19940812.0342	050/35 Tahun 2021
14.	YONO WIDODO	NONASN.19820917.0395	050/34 Tahun 2021

Sumber : BAPERLITBANG Tahun 2022, diolah

C. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 16);

9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 35);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 70);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 69);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar nomor 89 tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 89);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 19);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 119);

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Baperlitbang adalah :

- 1) menyusun laporan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Baperlitbang Tahun 2022;
- 2) mengumpulkan data dan informasi pencapaian indikator yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- 3) menguraikan permasalahan dan kendala yang dihadapi selama 1 tahun, yang dapat mempengaruhi pencapaian target indikator tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari instansi / unit kerja dalam menjalankan misi dan atau mencapai tujuan organisasi. sehingga Laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/ unit kerja.

E. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Baperlitbang selaku koordinator perencanaan pembangunan di daerah, menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang secara sistematis dan akurat;
3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah.

Disamping menghadapi permasalahan tersebut diatas BAPERLITBANG juga harus menghadapi tantangan dari luar yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Tantangan dari luar tersebut dapat berupa :

- Semakin kritis dan terbukanya pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan (adanya usulan-usulan yang selalu ditolak, sehingga masyarakat lebih cenderung apatis terhadap mekanisme perencanaan pembangunan)
- Adanya anggapan buruk terhadap perencanaan pembangunan, (Musrenbang; usulan tidak pernah masuk DSP) yang berakibat asumsi masyarakat mengenai kegiatan Musrenbang hanya kegiatan formalitas saja

- Iklim politik saat ini yang terlihat lebih dominannya Lembaga Legislatif dalam sistem Penganggaran.

F. SISTEMATIKA PELAPORAN

Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk Baperlitbang Tahun 2022 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja melalui beberapa cara sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

A. RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA

Tugas pokok Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 119 Tahun 2021 yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang merupakan kewenangan Daerah. Selain melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan teknis pada bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan pada bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
5. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Baperlitbang; dan
6. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A.1. Rencana Strategis

Memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 dapat diketahui tujuan strategis daerah salah satunya adalah ***Terwujudnya, tata kelola pemerintahan yang baik*** dengan salah satu sasaran daerah adalah **Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas.**

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 dapat diketahui tujuan dan sasaran strategis, salah satunya adalah tujuan dan sasaran strategis Baperlitbang di tahun 2022.

Tujuan strategis BAPERLITBANG adalah Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas, dengan 3 sasaran strategis yaitu :

- 1) Terwujudnya dokumen perencanaan daerah yang selaras, partisipatif dan implementatif;
- 2) Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian kinerja perencanaan pembangunan.
- 3) Meningkatnya hasil kelitbangan sebagai bahan perumusan kebijakan daerah.

Pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah ditunjukkan dengan capaian target indikator kinerja utama (IKU) OPD yang telah ditentukan, di setiap tahunnya,

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPERLITBANG Tahun 2022

No	Tujuan	Indikator	Satuan	Target	Ket
1	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	Nilai	82,39	mendukung target daerah nilai SAKIP A
	Sasaran				
1.1	Terwujudnya dokumen perencanaan daerah yang selaras, partisipatif dan implementatif	1) Persentase Kesesuaian Prioritas Nasional dan RKPD	%	100	
		2) Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	%	100	
1.2	Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian kinerja perencanaan pembangunan	1) Persentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD	%	86	
		2) Persentase realisasi capaian RPJMD	%	86	
1.3	Meningkatnya hasil kelitbangan sebagai bahan perumusan kebijakan daerah	1) Persentase hasil kajian yang Diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	%	45	
		2) Persentase inovasi yang diimplementasikan	%	45	

Sumber : Perubahan Renstra Baperlitbang, 2021

Indikator kinerja utama (IKU) OPD inilah yang akan dijadikan sebagai Perjanjian Kinerja antara Kepala Baperlitbang dengan Bupati, setiap tahunnya. Dalam rangka mencapai atau mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah tersebut pada tahun 2022 telah direncanakan Program, Kegiatan dan Subkegiatan dan rencana alokasi anggaran dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Baperlitbang Tahun 2022, dengan alokasi dana Rp. 7.469.865.250.-

A.2. Rencana Kerja

Sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar Tahun 2022, pada tahun 2022 Baperlitbang akan merencanakan 4 Program, 14 Kegiatan dan 36 sub kegiatan, sebagaimana terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 2.2.
Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU
1.	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		5.126.318.650
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	64.741.000
1)	Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA)	6 Dokumen	64.741.000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.204.018.250
2)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	4.154.838.250
3)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 laporan	49.180.000
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	132.255.000
4)	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 laporan	4.855.000
5)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	48 orang	127.400.000
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	223.009.400
6)	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	8.633.000
7)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	139.701.000
8)	Penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	12.000.000
9)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	5.894.800
10)	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	3.840.000
11)	Penyediaan Bahan/Material	12 bulan	9.126.000
12)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	19.788.000
13)	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	132.606.000
14)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 bulan	7.762.500
15)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 bulan	9.389.000
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	135.225.000
16)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30 item	135.225.000
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	159.270.000
17)	Penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	37.630.000
18)	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	72.200.000
19)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	49.440.000
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	207.800.000
20)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	124.460.000
21)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	31.440.000
22)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	51.900.000
2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		780.000.000
8.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100%	56.000.000
23)	Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen	560.000.000
9.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	10.000.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	PAGU
24)	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dokumen	10.000.000
10.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	210.000.000
25)	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	2 dokumen	200.000.000
26)	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	2 dokumen	10.000.000
3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			1.278.546.600
11.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	373.546.600
27)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	1 kali	120.000.000
28)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 kali	53.546.600
29)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 kali	200.000.000
12.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	470.000.000
30)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	1 kali	108.850.000
31)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 kali	252.669.000
32)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 kali	108.481.000
13.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	435.000.000
33)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	1 kali	160.000.000
34)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 kali	40.000.000
35)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1 kali	235.000.000
4. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			285.000.000
14.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100%	285.000.000
36)	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	30 inovasi	285.000.000
4 Program, 14 Kegiatan, 36 Subkegiatan,			7.469.865.250

Sumber : Perubahan Renja Baperlitbang, 2022

B. PERENCANAAN KINERJA

Tujuan dan sasaran strategis yang dilaksanakan melalui program kegiatan dan subkegiatan harus dinyatakan secara jelas kinerjanya dan dapat diukur atau dinilai capaiannya. Berdasarkan pada Renstra dan Renja Baperlitbang tahun 2022, maka kinerja yang akan dicapai adalah Pencapaian indikator kinerja utama OPD yang berupa indikator tujuan dan sasaran OPD yang berupa :

1. Nilai AKIP = 82,39;
2. Persentase Kesesuaian Prioritas Nasional dan RKPD = 100%
3. Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD = 100%
4. Persentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD = 86%
5. Persentase realisasi capaian RPJMD = 86%

6. Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah = 45%
7. Persentase inovasi yang diimplementasikan = 45%

Pencapaian target indikator tersebut diatas akan tergantung pada hasil pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan dengan indikator sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.
Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN/ TOLOK UKUR	TARGET
1.	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP OPD	82,39
1.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya tertib laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	100%
1)	Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA)	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	6 Dokumen
2.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya tertib laporan dokumen keuangan</i>	100%
2)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 bulan
3)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Penatausahaan keuangan	3 laporan
3.	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	100%
4)	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 laporan
5)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya kualitas SDM pegawai	48 orang
4.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Terlaksananya administrasi perkantoran</i>	100%
6)	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pemenuhan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan
7)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan
8)	Penyediaan bahan logistik kantor	Pemenuhan minuman harian pegawai dan makan minum rapat	12 bulan
9)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan
10)	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan
11)	Penyediaan Bahan/Material	Pemenuhan Bahan / Material Kantor	12 bulan
12)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pemenuhan Konsumsi rapat, tamu dan pegawai	12 bulan
13)	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Pemenuhan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 bulan
14)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pemenuhan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 bulan
15)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 bulan
5.	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kinerja</i>	100%
16)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	30 item

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN/ TOLOK UKUR	TARGET
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksana jasa penunjang urusan pemerintahan	12 bulan
17)	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan
18)	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran tagihan telepon, listrik, air dan internet,	12 bulan
19)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa/tenaga kebersihan kantor	12 bulan
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan
20)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemenuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, jumlah unit kendaraan dinas yang pajaknya harus dibayar	12 bulan
21)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemenuhan pemeliharaan peralatan kerja	12 bulan
22)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemenuhan pemeliharaan rutin gedung dan bangunan	12 bulan
2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Capaian jumlah program yang memenuhi target	91,5%
8.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan	100%
23)	Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	3 dokumen
9.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen analisa data pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	100%
24)	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	1 dokumen
10.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100%
25)	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	2 dokumen
26)	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan monitoring, evaluasi berkala pelaksanaan pembangunan daerah	2 dokumen
3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Capaian realisasi RPJMD	91,5%
11.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%
27)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPDP)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	1 kali
28)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	1 kali
29)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	1 kali

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/ KELUARAN KEGIATAN/ TOLOK UKUR	TARGET
12.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Air)	100%
30)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 kali
31)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	1 kali
32)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangun daerah bidang perekonomian	1 kali
13.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%
33)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangun daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 kali
34)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	1 kali
35)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur	1 kali
4.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan <i>fasilitasi</i> penelitian dan pengembangan	100%
14.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Terlaksananya pengembangan inovasi dan teknologi	100%
36)	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	30 inovasi

Sumber : Perubahan Renja Baperlitbang, 2022

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja secara lebih rinci dinyatakan dalam bentuk lampiran Pejanjian Kinerja Pegawai yang ditandatangani oleh pegawai dan atasan langsung. Secara singkat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Pegawai Baperlitbang Tahun 2022

No	jabatan	Indikator	Satuan	Target	Ket
1	Kepala Baperlitbang	1) Persentase Kesesuaian Prioritas Nasional dan RKPD	%	100	sasaran
		2) Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	%	100	sasaran
		3) Persentase realisasi capaian RPJMD	%	86	sasaran
		4) Persentase hasil kajian yang Diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	%	45	program

No	jabatan	Indikator	Satuan	Target	Ket
		5) Persentase inovasi yang diimplementasikan	%	45	program
		6) Nilai akuntabilitas kinerja OPD (AKIP)	Nilai	82,39	program
		7) Capaian jumlah program yang memenuhi target	%	91,5	program
		8) Persentase program dalam RPJMD yang dilaksanakan dalam Renja PD	%	91,5	program
		9) Cakupan fasilitasi penelitian dan pengembangan	%	100	program
2	Sekretaris Baperlitbang	10) Terlaksananya tertib laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	keg
		11) Terlaksananya tertib laporan dokumen keuangan	%	100	keg
		12) Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	keg
		13) Terlaksananya administrasi perkantoran	%	100	keg
		14) Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kinerja	%	100	keg
		15) Terlaksana jasa penunjang urusan pemerintahan	bulan	12	keg
		16) Terpeliharannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bulan	12	keg
3	Kabid LitbangPP	17) Terlaksananya koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan	%	100	keg
		18) Tersusunnya dokumen analisa data pembangunan yang disusun sesuai dengan ketentuan	%	100	keg
		19) Tersusunnya dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	%	100	keg
		20) Terlaksananya pengembangan inovasi dan teknologi	%	100	keg
4	Kabid Sosbud	21) Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	100	keg
5	Kabid Ekonomi	22) Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Air)	%	100	keg
6	Kabid Fispra	23) Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	%	100	keg
7	Kasubbag Umum	24) Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	bulan	14	Sub keg
		25) Jumlah laporan Penatausahaan keuangan	laporan	3	Sub keg
		26) Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	laporan	2	Sub keg
		27) Meningkatnya kualitas SDM pegawai	orang	48	Sub keg
		28) Pemenuhan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12	Sub keg
		29) Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	12	Sub keg
		30) Pemenuhan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12	Sub keg
		31) Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	12	Sub keg
		32) Pemenuhan minuman harian pegawai dan makan minum rapat	bulan	12	Sub keg
		33) Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	Sub keg
		34) Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	Sub keg
		35) Pemenuhan Bahan / Material Kantor	bulan	12	Sub keg
		36) Pemenuhan Konsumsi rapat, tamu dan pegawai	bulan	12	Sub keg
		37) Pemenuhan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	bulan	12	Sub keg

No	jabatan	Indikator	Satuan	Target	Ket
		38) Pemenuhan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	bulan	12	Sub keg
		39) Jumlah peralatan dan mesin lainnya	item	30	Sub keg
		40) Jumlah bulan tersedianya jasa surat menyurat	bulan	12	Sub keg
		41) Jumlah bulan pembayaran tagihan telepon, listrik, air dan internet,	bulan	12	Sub keg
		42) Jumlah bulan pembayaran jasa/tenaga kebersihan kantor	bulan	12	Sub keg
		43) Pemenuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional, jumlah unit kendaraan dinas yang pajaknya harus dibayar	bulan	12	Sub keg
		44) Pemenuhan pemeliharaan peralatan kerja	bulan	12	Sub keg
		45) Pemenuhan pemeliharaan rutin gedung dan bangunan	bulan	12	Sub keg
8	Subkoordinator Bidang Perencanaan OPD	46) Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	Dokumen	6	Sub keg
		47) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerin tahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	12	Sub keg
9	Kasubbid Litbang	48) Jumlah penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	inovasi	30	Sub keg
10	Subkoordinator Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan	49) Jumlah dokumen laporan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	dokumen	2	Sub keg
		50) Jumlah dokumen laporan monitoring, evaluasi berkala pelaksanaan pembangunan daerah	dokumen	2	Sub keg
11	Subkoordinator Bidang Penyusunan Program	51) Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	dokumen	3	Sub keg
		52) Jumlah data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	dokumen	1	Sub keg
12	Subkoordinator Bidang Pemerintahan dan Kependudukan	53) Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kali	1	Sub keg
13	Subkoordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial	54) Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	Kali	1	Sub keg
14	Subkoordinator Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	55) Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Kali	1	Sub keg
15	Subkoordinator Bidang Pengembangan Dunia Usaha	56) Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kali	1	Sub keg
16	Subkoordinator Bidang Kedaulatan Pangan dan Energi	57) Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Kali	1	Sub keg
		58) Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembanguna daerah bidang perekonomian	kali	1	Sub keg
17	Subkoordinator Bidang Prasarana Wilayah	59) Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangun daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kali	1	Sub keg
18	Subkoordinator Bidang Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	60) Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Kali	1	Sub keg
			Kali	1	Sub keg

No	jabatan	Indikator	Satuan	Target	Ket
		61) Jumlah koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur			

Sumber : Perubahan Renja Baperlitbang, 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Tugas pokok Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 119 Tahun 2021 yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang merupakan kewenangan Daerah.

Baperlitbang hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang pada 2 Urusan atau Bidang yaitu : Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan, yang kami laporkan Capaian Kinerjanya.

Pengukuran capaian kinerja adalah mengukur capaian (realisasi) indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan dibandingkan target indikator yang terdapat dalam Renja Perubahan OPD Tahun 2022, yang menjadi dasar perjanjian kinerja pegawai Baperlitbang.

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut :

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja melalui beberapa cara sebagai berikut:

A.1. Kinerja sasaran strategis dan Program (perbandingan target dan realisasi)

Analisis capaian kinerja pada bagian ini adalah membandingkan target indikator sasaran strategis organisasi dengan realisasinya, pada tahun 2022, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.
Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Terwujudnya dokumen perencanaan daerah yang selaras, partisipatif dan implementatif	1) Persentase Kesesuaian Prioritas Nasional dan RKPD	%	100	100	100
		2) Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	%	100	100	100

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
2.	Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian kinerja perencanaan pembangunan	1) Persentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD	%	86	83,5	97,1
		2) Persentase realisasi capaian RPJMD	%	86	89	103,5
3	Meningkatnya hasil kelibngan sebagai bahan perumusan kebijakan daerah	1) Persentase hasil kajian yang Diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	%	45	57	126,67
		2) Persentase inovasi yang diimplementasikan	%	45	78,69	174,87

Sumber : Perubahan Renstra Baperlitbang, 2021

Tabel 3.2.
Kinerja Program Tahun 2022

No	Program	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Nilai	82,39	-	-
2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian jumlah program yang memenuhi target	%	91,5	100	109,29
3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase program dalam RPJMD yang dilaksanakan dalam Renja PD	%	91,5	100	109,29
4.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan fasilitasi penelitian dan pengembangan	%	100	100	100

Sumber : Perubahan Renstra Baperlitbang, 2021

Tabel 3.3.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI	KRITERIA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017, hal 494

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tabel 3.1 dan 3.2, dengan mengacu pada tabel 3.3. diketahui bahwa kinerja Organisasi Baperlitbang Tahun 2022 adalah : **Sangat Tinggi**

A.2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Analisis capaian kinerja pada bagian ini adalah membandingkan realisasi dan kinerja indikator sasaran strategis dan program organisasi pada

tahun 2022 dengan capaian tahun sebelumnya (2021), sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4.
Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021 dan 2022

No	Sasaran	Indikator	Realisasi		Kinerja		Status
			2021	2022	2021	2022	
1.	Terwujudnya dokumen perencanaan daerah yang selaras, partisipatif dan implementatif	1) Persentase Kesesuaian Prioritas Nasional dan RKPD	100	100	100	100	Sama
		2) Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	100	100	100	100	Sama
2.	Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian kinerja perencanaan pembangunan	1) Persentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD	95,7	83,48	111,3	97,07	turun
		2) Persentase realisasi capaian RPJMD	85	89,00	101,19	103,49	Naik
3.	Meningkatnya hasil kelitbangan sebagai bahan perumusan kebijakan daerah	1) Persentase hasil kajian yang Diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	50	57	125	126,67	Naik
		2) Persentase inovasi yang diimplementasikan	40	78,69	100	174,87	Naik

Sumber : Baperlitbang, 2022

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tabel 3.4 diketahui bahwa pencapaian kinerja sasaran Organisasi Baperlitbang Tahun 2022 adalah mengalami **kenaikan kinerja** dibanding tahun 2021.

Tabel 3.5.
Perbandingan Kinerja Program Tahun 2021 dan 2022

No	Program	Indikator	Realisasi		Kinerja		Status
			2021	2022	2021	2022	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	73,56	-	95,05	-	-
2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian jumlah program yang memenuhi target	100	100	109,89	109,29	Turun
3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase program dalam RPJMD yang dilaksanakan dalam Renja PD	100	100	109,89	109,29	Turun
4.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan fasilitasi penelitian dan pengembangan	100	100	100	100	Sama

Sumber : Baperlitbang, 2023

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tabel 3.5, diketahui bahwa kinerja program oleh Baperlitbang Tahun 2022 jika dibanding tahun 2021 adalah mempunyai kinerja lebih rendah.

A.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah;

Analisis capaian kinerja pada bagian ini adalah membandingkan realisasi dan kinerja indikator sasaran strategis dan program organisasi pada tahun 2022 dengan target akhir dalam Renstra atau RPJMD Tahun 2023. Analisis ini untuk mengetahui apakah target dalam rencana jangka menengah sudah tercapai belum, sehingga perlu kerja keras atau menjadi prioritas tidak di tahun berikutnya. Hasil analisis sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6.
Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Realisasi Tahun 2022 dan Target 2023

No	Sasaran	Indikator	Realisasi	Target	Status
			2022	2023	
1.	Terwujudnya dokumen perencanaan daerah yang selaras, partisipatif dan implementatif	1) Persentase Kesesuaian Prioritas Nasional dan RKPD	100	100	Tercapai
		2) Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	100	100	Tercapai
2.	Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian kinerja perencanaan pembangunan	1) Persentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD	83,48	88	Belum
		2) Persentase realisasi capaian RPJMD	89,00	90	Tercapai
3.	Meningkatnya hasil kelitbangan sebagai bahan perumusan kebijakan daerah	1) Persentase hasil kajian yang Diimple mentasikan menjadi kebijakan daerah	57	50	Tercapai
		2) Persentase inovasi yang diimplementasikan	78,69	50	Tercapai

Sumber : Baperlitbang, 2023

Tabel 3.7.
Perbandingan Kinerja Program Realisasi Tahun 2022 dan Target 2023

No	Program	Indikator	Realisasi	Target	Status
			2022	2023	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-	87,39	Belum tercapai
2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian jumlah pro gram yang memenuhi target	100	92%	Tercapai
3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase program dalam RPJMD yang dilaksanakan dalam Renja PD	100	92%	Tercapai
4.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan fasilitasi penelitian dan pengembangan	100	100	Tercapai

Sumber : Baperlitbang, 2023

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tabel 3.6 dan 3.7, diketahui bahwa kinerja Organisasi Baperlitbang Tahun 2022 adalah Sebagian besar sudah tercapai karena indikator bersifat absolut (target tahunan berdiri sendiri) tidak tergantung nilai pada tahun sebelumnya. Khusus untuk nilai SAKIP Perangkat Daerah : **belum tercapai**, masih membutuhkan kerja keras.

A.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Masih terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang membutuhkan perbaikan untuk dituangkan dalam dokumen perencanaan tahun berikutnya. Permasalahan tersebut adalah :

- 1) Masih belum meratanya beban pekerjaan / indikator kinerja yang tidak merata; (Ada jabatan yang belum mempunyai beban pekerjaan / kinerja yang terlalu banyak, sebaliknya ada yang sedikit);
- 2) Belum ada kejelasan indikator kinerja ditanggungjawab oleh siapa untuk level (subkoordinator / kasubbid);
- 3) Perlunya kejelasan pohon kinerja dan crosscutting program kegiatan;
- 4) Tugas dan fungsi bidang belum tercermin dalam indikator yang ditetapkan, terutama terkait monitoring dan evaluasi bidang;
- 5) Indikator urusan kelitbang perlu dijelaskan dan dipastikan formulasnya sehingga dapat terukur dengan benar.

Dalam rangka perbaikan kualitas perencanaan beberapa hal perlu dilakukan :

- 1) Perlu kesepahaman Bersama bagi perencana OPS terkait dengan indikator, perumusan (formulasi), leveling indikator (keterkaitan langsung), sehingga diperlukan diklat, bimtek atau workshop bagi perencana;
- 2) Penggunaan aplikasi yang sudah jadi (siap, lengkap, terukur, sederhana, mudah digunakan) agar dokumen perencanaan konsisten dan sinkron baik pusat, provinsi, daerah dan OPD;
- 3) Pemerataan beban kerja bagi pegawai (indikator kinerja numpuk pada satu bidang atau sub bidang); sebagai contoh beban pekerjaan dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pada 1 orang;
- 4) Perbaikan komunikasi eksternal maupun internal OPD karena dokumen perencanaan sampai pelaporan, sangat tergantung pada komunikasi antar bidang / sekretariat, antar OPD dan atau antar Pemerintah (pusat dan daerah).

A.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Bagian ini menganalisis sumberdaya yang dimiliki oleh Baperlitbang dengan indikator strategis yang ditetapkan dan capaian kinerja yang dihasilkan. Dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana Gedung kantor (peralatan, perlengkapan, gedung, kendaraan, telepon, listrik, air, internet dll) sudah mencukupi untuk kelancaran pegawai bekerja.

Keberadaan pegawai yang ASN sejumlah 33 orang, dirasakan kurang untuk mengelola keuangan dan melaksanakan kegiatan dan aktivitas sehari-hari, meskipun sudah dibantu tenaga Non ASN sebanyak 14 orang. Sebagai sebuah Perangkat Daerah yang mempunyai keterlibatan pada semua urusan pemerintahan, keterkaitan dengan OPD, keberagaman acara dan kegiatan ketersediaan pegawai baik ASN dan Non ASN masih dirasakan kurang. Karena sebagian ASN akan terfokus pada pengelolaan keuangan, barang dan asset, serta kegiatan tambahan yang berasal dari pusat, provinsi ataupun dari OPD lain.

Dalam pencapaian kinerja Baperlitbang tahun 2022 diperlukan sumber daya anggaran untuk melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan sebagai menjabarkan tugas dan fungsi Baperlitbang yaitu melaksanakan urusan perencanaan dan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Karanganyar. Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dalam pencapaian kinerja, sebagaimana tabel 3.8 di bawah ini

Tabel 3.8.
Rincian Capaian Kinerja, Penyerapan dan Efisiensi Anggaran

No	Program	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran Rp)	Efisiensi Anggaran (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	4.910.566.770	95,79%	215.740.880	4,21%
2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	100	774.557.360	99,30%	5.442.640	0,70%
3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	100	1.249.123.482	97,70%	29.423.218	2,30%
4.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	100	274.265.930	96,23%	10.734.070	3,77%

Sumber : Baperlitbang, 2022, diolah

Berdasarkan tabel 3.8 tersebut, maka Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022 telah melaksanakan program dan kegiatan (No. 2, 3 dan 4 pada tabel diatas) untuk pencapaian tujuan dengan capaian kinerja sangat memuaskan yaitu 100% dengan tetap melakukan efisiensi anggaran. Dikecualikan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (No. 1 pada tabel diatas) belum

dapat diukur kinerjanya karena nilai Sakip Baperlitbang tahun 2022 belum keluar.

A.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa indikator program dan kegiatan nilai menunjukkan angka atau nilai absolut, angka yang berdiri sendiri untuk tiap tahunnya, kecuali indikator nilai SAKIP, capai tahun sebelumnya akan mempengaruhi nilai tahun berikutnya.

Penentuan indikator dari tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan yang sering kali tidak berkaitan langsung atau bukan merupakan input bagi indikator di level berikutnya. Hal ini dapat mengakibatkan capaian kinerja seringkali tidak dipengaruhi oleh aktivitas pada level dibawahnya atau aktivitas yang ada tidak sesuai.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Hasil realisasi anggaran mempengaruhi capaian kinerja sasaran strategis organisasi, dapat dilihat pada tabel 3.8 dibawah ini Pada tahun 2022 realisasi anggaran adalah sebesar 96,50% atau Rp. 7.208.513.542,00

Tabel 3.9.
Realisasi Anggaran dan Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD	REALISASI	%	STATUS
1	2	3	4	5	6
<i>I.</i>	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	5.126.307.650	4.910.566.770	95,79%	ST
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.741.000	64.516.000	99,65%	ST
1)	Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA)	64.741.000	64.516.000	99,65%	ST
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.204.018.250	4.005.735.577	95,28%	ST
2)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.154.838.250	3.956.598.577	95,23%	ST
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	49.180.000	49.137.100	99,91%	ST
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	132.255.000	130.344.800	98,56%	ST
4)	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.855.000	4.772.800	98,31%	ST
5)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	127.400.000	125.572.000	98,57%	ST
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	222.998.400	221.848.873	99,48%	ST
6)	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.633.000	8.547.000	99,00%	ST
7)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.970.100	13.662.000	97,79%	ST

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD	REALISASI	%	STATUS
1	2	3	4	5	6
8)	Penyediaan bahan logistik kantor	12.000.000	11.948.950	99,57%	ST
9)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.894.800	5.841.300	99,09%	ST
10)	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.840.000	3.840.000	100,00%	ST
11)	Penyediaan Bahan/Material	9.126.000	9.125.500	99,99%	ST
12)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.788.000	19.755.000	99,83%	ST
13)	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	132.606.000	132.539.623	99,95%	ST
14)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.762.500	7.372.500	94,98%	ST
15)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9.378.000	9.217.000	98,28%	ST
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	135.225.000	133.640.000	98,83%	ST
16)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	135.225.000	133.640.000	98,83%	ST
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.270.000	149.027.872	93,57%	ST
17)	Penyediaan jasa surat menyurat	37.630.000	37.630.000	100,00%	ST
18)	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	72.200.000	61.962.372	85,82%	T
19)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	49.440.000	49.440.000	100,00%	ST
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	207.800.000	205.453.548	98,87%	ST
20)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	124.460.000	123.214.548	99,00%	ST
21)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.440.000	30.774.000	97,88%	ST
22)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	51.900.000	51.465.000	99,16%	ST
II.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	780.000.000	774.557.360	99,30%	ST
8.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	560.000.000	556.158.650	99,31%	ST
23)	Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/ Kota	560.000.000	556.158.650	99,31%	ST
9.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	10.000.000	9.983.750	99,84%	ST
24)	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	10.000.000	9.983.750	99,84%	ST
10.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	210.000.000	208.414.960	99,25%	ST
25)	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	200.000.000	198.554.460	99,28%	ST
26)	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	10.000.000	9.860.500	98,61%	ST
III.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.278.546.600	1.249.123.482	97,70%	ST
11.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	373.546.600	366.602.209	98,14%	ST
27)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	120.000.000	117.366.950	97,81%	ST
28)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	53.546.600	53.006.150	98,99%	ST
29)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	200.000.000	196.229.109	98,11%	ST

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	APBD	REALISASI	%	STATUS
1	2	3	4	5	6
12.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	470.000.000	457.640.350	97,37%	<i>ST</i>
30)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	108.850.000	104.778.500	96,26%	<i>ST</i>
31)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	252.669.000	245.924.650	97,33%	<i>ST</i>
32)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	108.481.000	106.937.200	98,58%	<i>ST</i>
13.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	435.000.000	424.880.923	97,67%	<i>ST</i>
33)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	160.000.000	154.951.409	96,84%	<i>ST</i>
34)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	40.000.000	38.459.350	96,15%	<i>ST</i>
35)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	235.000.000	231.470.164	98,50%	<i>ST</i>
IV.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	285.000.000	274.265.930	96,23%	<i>ST</i>
14.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	285.000.000	274.265.930	96,23%	<i>ST</i>
36)	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	285.000.000	274.265.930	96,23%	<i>ST</i>
	2 urusan 4 Program, 14 Kegiatan, 37 Subkegiatan	7.469.854.250	7.208.513.542	96,50%	<i>ST</i>

Sumber : Baperlitbang, 2023

ST = Sangat tinggi

Beberapa subkegiatan yang terendah realisasinya di bawah rata-rata 96,50% adalah:

- 1) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik = 85,82%
- 2) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD = 94,98%
- 3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN = 95,23%
- 4) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur = 96,15%;
- 5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) = 96,26%

Beberapa kegiatan yang terendah realisasinya di bawah rata-rata 96,50% adalah :

- 1) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah = 93,57%
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah = 95,25%
- 3) Pengembangan Inovasi dan Teknologi = 96,23%

Jadi secara keseluruhan hanya sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang realisasinya tinggi, hal ini karena kurang tepatnya

asumsi/perkiraan besaran pajak jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang harus dibayarkan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022 merupakan laporan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2022.

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan sudah melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya dengan kinerja **sangat tinggi (sangat baik)**, dengan nilai 117,02%. dan mencapai target indikator kinerja sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022. Realisasi program, kegiatan dan subkegiatan baik capaian indikator maupun anggaran berada di atas 90%. Dengan membandingkan persentase kinerja anggaran dan pencapaian target indikator, secara singkat dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan secara efisien, sedangkan untuk efektivitas program kegiatan memperhatikan jumlah indikator sebanyak 62 buah, dan tenaga kerja yang ada, dapat dikatakan efektif.

Masih terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang membutuhkan perbaikan untuk dituangkan dalam dokumen perencanaan tahun berikutnya. Permasalahan tersebut adalah :

- 1) Masih belum meratanya beban pekerjaan / indikator kinerja yang tidak merata; (Ada jabatan yang belum mempunyai beban pekerjaan / kinerja yang terlalu banyak, sebaliknya ada yang sedikit);
- 2) Belum ada kejelasan indikator kinerja ditanggungjawab oleh siapa untuk level (subkoordinator / kasubbid);
- 3) Perlunya kejelasan pohon kinerja dan crosscutting program kegiatan;
- 4) Tugas dan fungsi bidang belum tercermin dalam indikator yang ditetapkan, terutama terkait monitoring dan evaluasi bidang;
- 5) Indikator urusan kelitbang perlu dijelaskan dan dipastikan formulasnya sehingga dapat terukur dengan benar.

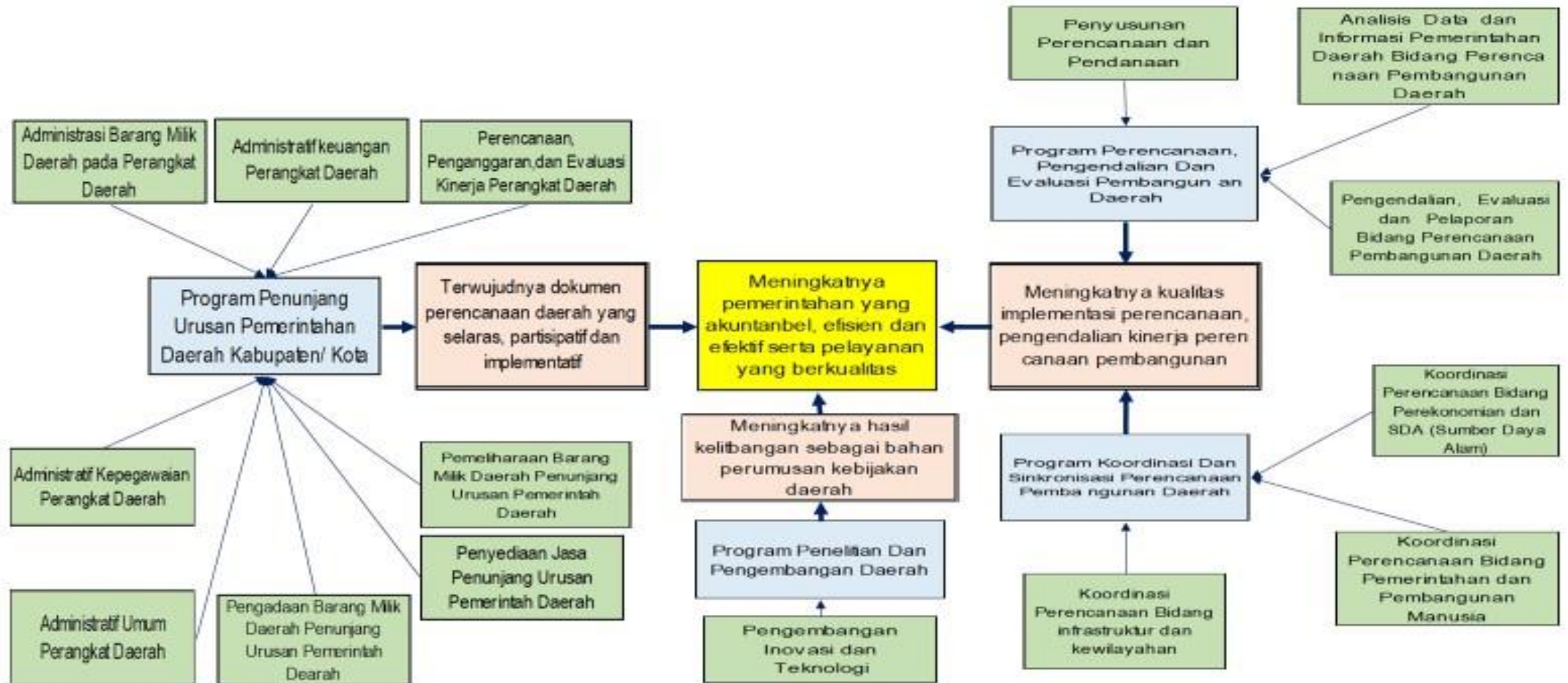
B. SARAN

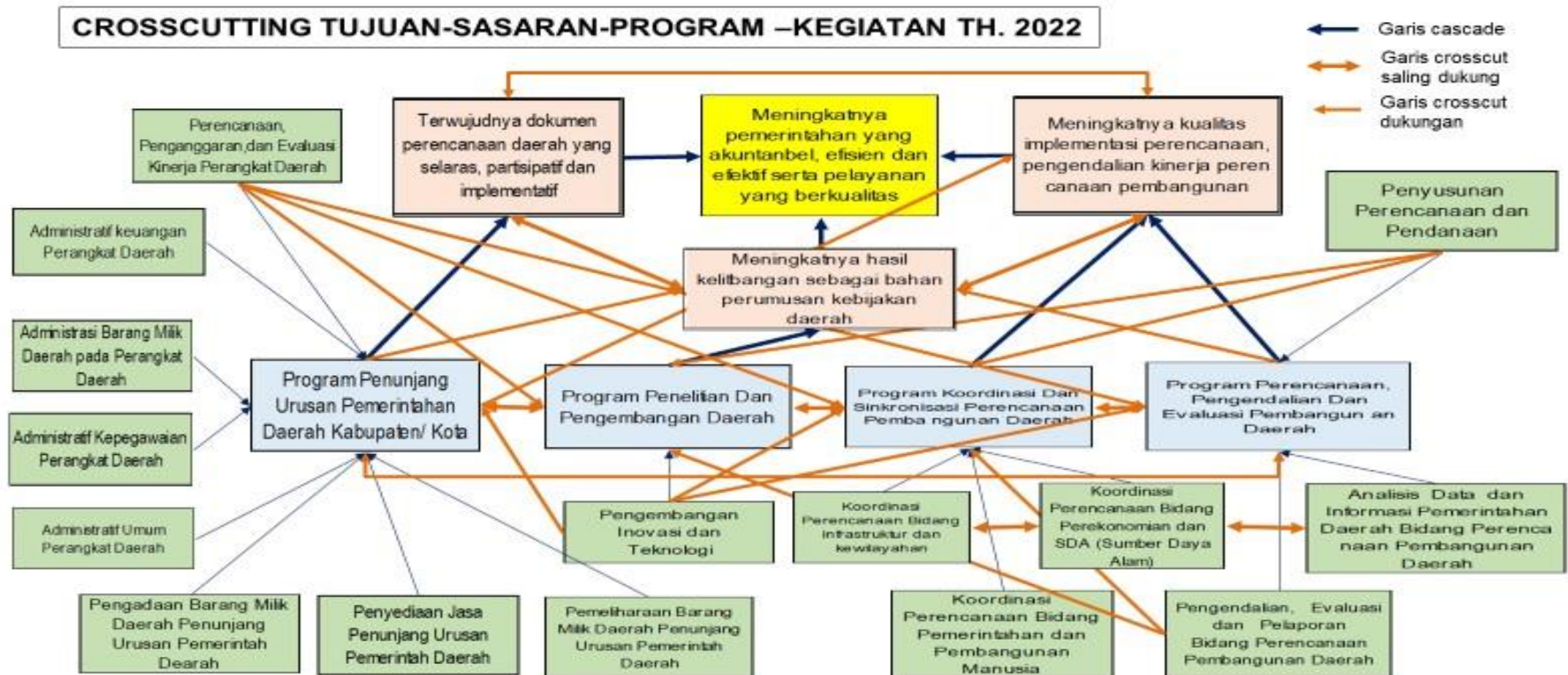
BAPERLITBANG sebagai Koordinator penyusunan rencana pembangunan daerah, membutuhkan dukungan dan peran serta semua pihak, terutama Perangkat Daerah, agar dapat mewujudkan rencana pembangunan yang berkualitas, realistis

konsisten dan sinkron dengan pusat dan provinsi. Dalam rangka perbaikan kualitas perencanaan beberapa hal perlu dilakukan :

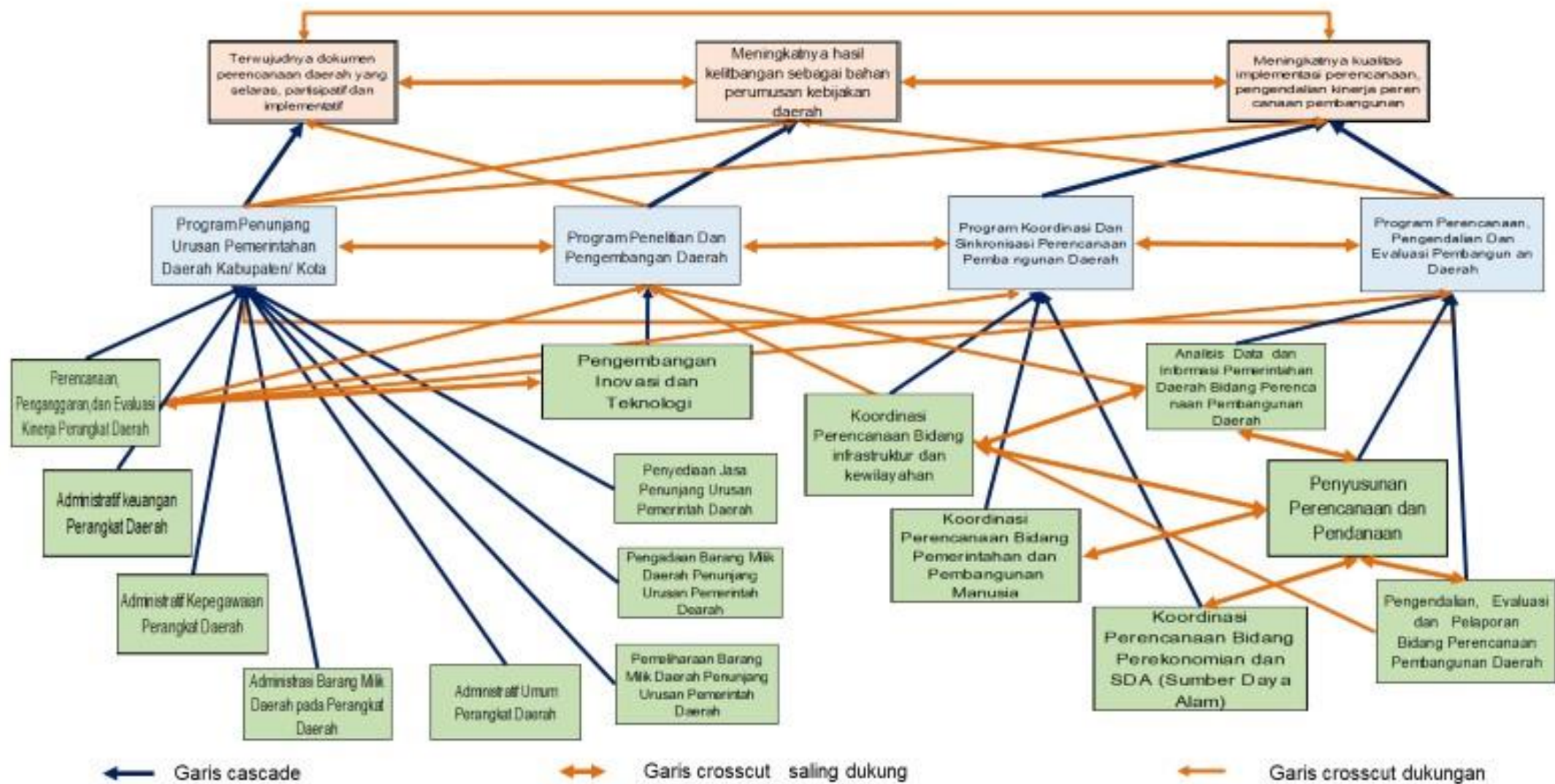
- 1) Perlu kesepahaman Bersama bagi perencana OPD terkait dengan indikator, perumusan (formulasi), leveling indikator (keterkaitan langsung), sehingga diperlukan diklat, bimtek atau workshop bagi perencana;
- 2) Penggunaan aplikasi yang sudah jadi (siap, lengkap, terukur, sederhana, mudah digunakan) agar dokumen perencanaan konsisten dan sinkron baik pusat, provinsi, daerah dan OPD;
- 3) Pemerataan beban kerja bagi pegawai (indikator kinerja numpuk pada satu bidang atau sub bidang); sebagai contoh beban pekerjaan dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pada 1 orang;
- 4) Perbaikan komunikasi eksternal maupun internal OPD karena dokumen perencanaan sampai pelaporan, sangat tergantung pada komunikasi antar bidang / secretariat, antar OPD dan atau antar Pemerintah (pusat dan daerah).

CASCADING TUJUAN-SASARAN-PROGRAM –KEGIATAN TH. 2022





CROSSCUTTING SASARAN-PROGRAM - KEGIATAN TH. 2022



CROSSCUTTING TUJUAN-SASARAN-PROGRAM-KEGIATAN TH. 2022 BERDASARKAN INDIKATOR

